PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 10 Juli 2020 Halaman: 1

BANYAK PROGRAM BELUM JALAN

# Sultan: Jangan 'Ewuh'

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti banyaknya program/kegiatan di kabupaten/kota se-DIY yang belum berjalan atau belum terealisasi, sehingga penyerapan APBD kurang maksimal. Khususnya realisasi APBD Kabupaten/Kota dalam tiga hal yaitu kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan ekonomi yang disesuaikan dengan program yang telah ditentukan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Untuk itu, Pemkab/Pemkot di DIY diminta tidak *ewuh* memaksimalkan penyerapan anggaran program/kegiatan, terutama guna penanggulangan pandemi Covid-19 paling tidak lebih dari 95 persen.

"Kami bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan DIY menyoroti program-program kabupaten/kota di DIY yang belum terealisasi di dalam APBD-nya," kata Sultan HB X usai memimpin Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi DIY Pascapandemi Covid-19 di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (9/7).

Sultan HB X mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan pelaksanaan program-program di setiap kabupaten/kota se-DIY terlihat yang sudah dan belum terealisasi. Untuk itu, pihaknya mendorong agar program-program di kabupaten/kota segera direalisasikan secepatnya. Pemda DIY pun harus membuat APBD Perubahan 2020. Sultan berharap APBD yang sudah dianggarkan untuk kebencanaan ini penyerapannya

* Bersambung hal 7 kol 1

**Sultan:** ..... Sambungan hal 1

bisa direalisasikan dengan baik. Khususnya di sektor-sektor prioritas dan unggulan di DIY seperti pariwisata, pendidikan, pertanian dan sebagainya, tergantung potensi di masing-masing kabupaten/kota. "Kita hanya mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam pemulihan pariwisata dan sebagainya. Jangan sekaligus tetapi bertahap dengan tetap mengacu protokol kesehatan maupun Standard Operating Procedure (SOP)," kata Sultan.

Pandemi Covid-19 belum dapat diprediksi kapan berhenti, sehingga Sultan HB X tetap meminta dalam keadaan darurat dan krisis akibat pandemi kerjanya harus cepat. Suasana kondusif di DIY harus dijaga sehingga penyerapan APBD 2020 bisa terealisasi dengan baik guna memulihkan pertumbuhan perekonomian daerah. "Justru demi memulihkan pertumbuhan ekonomi di DIY ini maka kalau bisa APBD 2020 terserap lebih dari 95 persen dan saat ini baru 80 persen. Karena sisa waktu penyerapan APBD 2020 sampai akhir tahun, dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti ini tidak mungkin menarik investor, sehingga pertumbuhan PDRB kita sangat tergantung penyerapan APBD," tegasnya.

Menurut Sultan HB X, apabila APBD 2020 sudah dikeluarkan tetapi masyarakat DIY tidak melakukan pembelanjaan, maka dikhawatirkan akan minus pertumbuhan ekonominya. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi DIY terutama di Triwulan III dan IV-2020 tetap tumbuh. Untuk itu seluruh sektor potensial harus dibangkitkan.

"Jangan asal uang keluar, tetapi target penyerapannya di atas 95 persen harus bisa dilakukan, syukur lebih. Jadi jangan *ewuh* mengeluarkan uang karena itu duitnya Pusat dan masyarakatnya orang DIY, masa *ewuh*?" ucap Sultan.

Kepala Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan mengatakan, Pemda DIY telah mengalokasikan anggaran Rp 368,45 miliar untuk penanganan Covid-19 untuk tiga pos belanja, yakni Rp 85,99 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp 36,56 untuk penanganan dampak ekonomi, dan Rp 245,88 miliar untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Adapun total realokasi anggaran Pemda se-DIY untuk penanganan Covid-19 tahun ini sebesar Rp 782,47 miliar.

"Akibat dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19, ruang fiskal Pemda DIY 2020 mengalami penurunan dibandingkan 2019, yakni dari 24,55 persen menjadi 23,20 persen. Penurunan ini menyebabkan semakin rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat merealisasikan program/kegiatan selain belanja wajibnya. Di sisi lain, Pemda DIY juga mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan defisit anggaran semakin besar," tambah Hilman. (Ira)-d

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Dinas Kesehatan<br>2. BPKAD<br>3. Dinas Sosial | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005